

## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM CORPORATE**

### **SOCIAL RESPONSIBILITY PARTICIPATION IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM**

**AA Kusumadinata<sup>1a</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda Bogor  
 Jl. Tol Ciawi No.1 Kotak Pos 35 Bogor 16720

<sup>a</sup> Korespondensi: Ali Alamsyah Kusumadinata, Email: alialamsyahkusumadinata@gmail.com  
 (Diterima: 07-03-2013; Ditelaah: 10-03-2013; Disetujui: 12-03-2013)

#### **ABSTRACT**

Empowerment is road participation determine social and economical community development program impacts. Generally, this research aimed to identify the correlation between participation level of society and stakeholders in holding Corporate Social Responsibility (CSR) program of Geothermal Corporation through Micro Finance Board and its impact to the community's social and economical condition. This research was concerened to see the implementation of Community Based Micro Finance Program in Kabandungan District by holding LKMS Kartini. The subjects of this research were the society of Cihamerang Village, including its local government and local community, also corporate staff. Methods which are implied in this research consist of quantitative and qualitative study. Sample taken as many as fourty-five respondents who represent Cihamerang Village community, with the informant as many as nine persons. Results of this research shows that the higher society and stakeholders participation level in every steps of program implementation, the higher social and economical impacts will be got.

Key words: Corporate Social Responsibility (CSR), community development, social and economical impacts.

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait dalam penyelenggaraan program pemberdayaan ekonomi lokal melalui pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Kartini untuk mendukung keberadaan dan perkembangan usaha kecil menengah di tingkat masyarakat lokal serta hubungannya terhadap dampak sosial ekonomi yang akan diperoleh masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program pemberdayaan ekonomi lokal dan stakeholder berhubungan dengan dampak sosial dan ekonomi masyarakat sehingga jika partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program tinggi, maka dampak sosial dan ekonomi juga akan tinggi. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat selain keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan program. Artinya, keterlibatan masyarakat dalam program ini bukan menjadi satu-satunya penentu taraf hidup, tingkat pendapatan, tingkat tabungan, serta bagaimana kekuatan modal sosial masyarakat.

Kata kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), pengembangan masyarakat, dampak sosial dan ekonomi.

---

Kusumadinata AA. 2013. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program corporate social responsibility. *Jurnal Sosial Humaniora* 4(1): 11-24.

---

#### **PENDAHULUAN**

Perusahaan sebagai sebuah sistem, dalam keberlanjutan dan keseimbangannya tidak dapat

berdiri sendiri. Keberadaan perusahaan dalam lingkungan masyarakat membawa pengaruh bagi kehidupan sosial, ekonomi, serta budaya. Dalam hal ini, perusahaan memiliki potensi

mengembangkan wilayah karena beroperasinya perusahaan di suatu wilayah masyarakat dapat mengundang aktivitas-aktivitas masyarakat lokal, seperti penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan, termasuk fenomena menjamurnya masyarakat lokal yang membuka usaha baru untuk pemenuhan kebutuhan karyawan dan seluruh pihak yang berkaitan dengan adanya aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengingat dan memperhatikan aspek sosial dan budayanya, seperti dengan membina hubungan baik yang bersifat *reciprocal* (timbal balik) dengan stakeholder-stakeholder lain, baik pemerintah, swasta, maupun dari berbagai tingkatan elemen masyarakat. Hubungan baik ini dapat dibentuk dari adanya interaksi antar stakeholder dalam kaitannya dengan penyelenggaraan program Corporate Social Responsibility (CSR).

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah konsep moral dan etos berciri umum. Oleh karena itu, pada tataran praktisnya harus diwujudkan ke dalam program-program konkret. CSR dapat diklasifikasikan dalam tiga aspek, yaitu keterlibatan dalam komunitas, pembuatan produk yang bisa dipertanggungjawabkan secara sosial, dan *employee relations* (Wibisono 2007).

Keterlibatan komunitas itu diantaranya pengembangan masyarakat (*community development*). Salah satu prinsip *community development* adalah partisipasi. Partisipasi dalam pengembangan komunitas harus menciptakan keterlibatan aktif semua stakeholder, baik pemerintah, masyarakat, maupun perusahaan. Partisipasi seluruh stakeholder diwujudkan melalui penyelenggaraan program CSR dari proses perencanaan, implementasi, hingga monitoring evaluasi dan pelaporan. Mengacu pada sejauh mana keberadaan perusahaan membawa pengaruh bagi kehidupan masyarakat sekitar, berjalannya roda kehidupan masyarakat dengan segala bentuk perubahan sosial dan lingkungan yang dapat diterima dan diatur oleh pranata sosial yang ada menjadi indikator penting. Meskipun demikian, pengaruh keberadaan perusahaan belum tentu membawa angin positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, bagaimana penyelenggaraan program CSR mengintegrasikan partisipasi seluruh stakeholder mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi komunitas yang mencakup modal sosial dan taraf hidup.

Perusahaan Geothermal di Gunung Salak merupakan perusahaan yang mendayagunakan energi panas bumi terbesar di dunia. Perusahaan Geothermal menyelenggarakan program CSR yang mencakup tiga area kritis, yakni kebutuhan dasar, pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan usaha kecil mikro. CSR yang diselenggarakan oleh perusahaan Geothermal merupakan bagian dari *strategic plan* perusahaan yang memfokuskan pada pelaksanaannya berorientasi pada penciptaan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan masyarakat dan investasi masyarakat. Desa Cihamerang merupakan salah satu desa yang bersinggungan langsung dengan wilayah operasi perusahaan karena lokasinya yang terletak di dalam lingkup Kecamatan Kabandungan. Sejauh mana implementasi dari program pengembangan masyarakat dalam kaitannya dengan partisipasi seluruh stakeholder yang pada akhirnya membawa dampak bagi komunitas perdesaan.

Oleh karena itu, rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana tingkat partisipasi stakeholder (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam penyelenggaraan program CSR? Adapun tujuan penelitian ini secara khusus adalah mengidentifikasi tingkat partisipasi stakeholder (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam penyelenggaraan program CSR. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para peneliti yang ingin mengkaji lebih jauh mengenai CSR dan kalangan non akademisi, pemerintah, maupun swasta dan dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pertimbangan dalam penerapan CSR yang berbasiskan pengembangan masyarakat.

## Tinjauan Teori

### Corporate Social Responsibility

Konsep CSR (Corporate Social Responsibility) memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli. Definisi CSR berasal dari konsep dan pemikiran yang dicetuskan oleh John Elkington tahun 1997 yang disadur oleh Wibisono (2007) dalam bukunya yang berjudul "Cannibals with Forks, The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business", mengemukakan konsep 3P (*profit, people, dan planet*) yang menerangkan bahwa dalam menjalankan operasional perusahaan, selain mengejar *profit* (keuntungan) ekonomis sebuah korporasi harus dapat memberikan kontribusi positif bagi *people*

(masyarakat) dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

CSR adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan. Semua itu diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

### Community Development

Community Development dalam perspektif internasional merupakan salah satu kekuatan sosial yang signifikan dalam proses perubahan yang direncanakan, dipromosikan sebagai pengembangan dunia, dan sebagai bagian dalam proses pembangunan bangsa, serta sebagai standar dalam pembangunan masyarakat miskin (Budimanta dan Radito 2003). Konsep dasar dari Community Development adalah kebutuhan manusia, komunitas, partisipasi, dan pengembangan. Sejalan dengan hal tersebut, Nasdian (2006) memaparkan bahwa Community Development (pengembangan masyarakat) adalah konsep dasar yang menggarisbawahi sejumlah istilah yang telah digunakan sejak lama, seperti *community resource development*, *rural areas development*, *community economic development*, *rural revitalization*, dan *community based development*. Sebagaimana asal katanya, pengembangan masyarakat terdiri dari dua konsep, yaitu "pengembangan" dan "masyarakat". Secara singkat, pengembangan dan pembangunan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia (Suharto 2005). Nasdian (2006) juga menggambarkan hal serupa, yaitu pengembangan masyarakat menggambarkan makna yang penting dari dua konsep yakni "community" dan "development". Konsep "community" bermakna sebagai kualitas hubungan sosial, sedangkan "development" bermakna sebagai perubahan ke arah kemajuan yang terencana dan bersifat gradual.

Suharto (2005) mengembangkan tiga model yang berguna dalam memahami konsepsi tentang pengembangan masyarakat, diantaranya ialah (1) pengembangan masyarakat lokal (*locality development*), (2) perencanaan sosial (*social planning*), dan (3) aksi sosial (*social*

*action*). Dalam praktiknya, ketiga model tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Setiap komponen dapat digunakan secara kombinasi dan simultan sesuai dengan kebutuhan dan situasi tertentu. Beroperasinya sebuah perusahaan haruslah mengingat dan memperhatikan keadaan gejala sosial budaya yang ada di sekitarnya, sehingga dengan adanya pergerakan sosial budaya, keberadaan suatu perusahaan di suatu daerah dapat mendorong bermunculannya kegiatan sosial ekonomi komunitas sekitarnya, seperti adanya perusahaan-perusahaan jasa penunjang kehidupan perusahaan yang besar. Kondisi tersebut membentuk adanya pola hubungan baru diantara komunitas pendatang dan komunitas lokal atau dalam hal ini masyarakat sekitar. Untuk meningkatkan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan perusahaan diperlukan suatu cara untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian masyarakat, salah satunya adalah melalui Community Development.

### MATERI DAN METODE

Penelitian dilakukan di Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, sebagai salah satu penerima dan partisipan dalam program Corporate Social Responsibility. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*). Perusahaan Geothermal adalah perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam, yakni dalam bentuk panas bumi untuk diolah menjadi bentuk tenaga listrik, serta dalam perjalanannya telah menerapkan CSR sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan, sehingga relevan untuk mengkaji dampak implementasi program CSR terhadap masyarakat sekitar wilayah perusahaan. Program Community Based Micro Finance melalui pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Kartini menjadi fokus dalam penelitian ini. Penjajagan lokasi penelitian dan pengambilan sampel dilakukan pada bulan Agustus 2012 hingga Januari 2013. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang didukung oleh pendekatan kualitatif. Untuk penelitian kuantitatif digunakan metode survei. Kuesioner digunakan sebagai instrumen untuk mengumpulkan informasi dari responden. Umumnya, pengertian survei dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari

sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi (Singarimbun 2006).

Pendekatan kualitatif dilakukan karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam serta rinci terkait suatu peristiwa atau gejala sosial strategi dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Pemilihan studi kasus didasarkan atas pertimbangan bahwa studi kasus merupakan strategi penelitian yang memiliki sifat multi metode, seperti wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen (Sitorus 1998).

Jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 45 orang yang terdiri dari 30 responden dari masyarakat pemanfaat program dan 15 responden pembanding dari masyarakat non-pemanfaat program, sedangkan jumlah informan sebanyak 12 orang. Penentuan jumlah responden yang diambil didasarkan pada pernyataan Singarimbun (2006) bahwa bilamana analisa yang dipakai adalah teknik korelasi, maka sampel yang diambil minimal 30 kasus. Penjelasan mengenai teknik korelasi akan dipaparkan pada sub bab selanjutnya. Responden dipilih secara purposif menggunakan teknik pengambilan sampel acak sederhana.

*Sampling population* adalah masyarakat pemanfaat program, yakni masyarakat Desa Cihamerang yang menjadi anggota kelompok simpan pinjam LKMS Kartini dan populasi sasaran adalah masyarakat yang telah mengikuti kegiatan simpan pinjam selama dua kali putaran. Pengambilan sampel dari *sampling framework* dilakukan secara purposif mengingat penelitian ini diarahkan untuk melihat dampak penyelenggaraan program sehingga responden yang dipilih merupakan anggota kelompok simpan pinjam yang sudah mengikuti dua kali putaran pinjaman modal.

Dalam penelitian ini, terdapat dua data yang diperlukan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan informan dan penyebaran kuesioner kepada responden di lapangan. Adapun data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis baik yang berupa tulisan ilmiah ataupun dokumen resmi instansi terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian kuantitatif adalah dengan penyebaran instrumen pengumpulan data, yakni kuesioner.

Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif. Data

kualitatif baik primer maupun sekunder yang telah didapatkan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis data primer dan sekunder diolah menggunakan tiga tahapan kegiatan analisis data dan dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sitorus 1998).

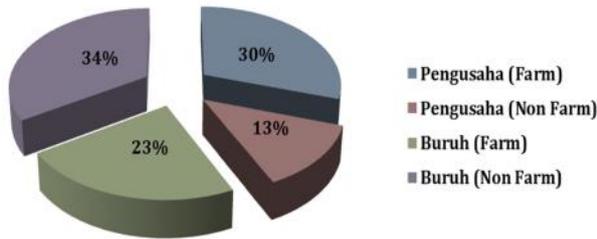
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penggolongan Masyarakat Pemanfaat dan Masyarakat Non-Pemanfaat Program

Penggolongan masyarakat pemanfaat program dalam kegiatan CSR adalah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kelompok simpan pinjam LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) Kartini, sedangkan masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan kelompok simpan pinjam LKMS Kartini merupakan masyarakat non-pemanfaat program. Masyarakat kemudian dikategorikan kembali ke dalam kategori-kategori sosial berdasarkan jenis mata pencahariannya. Hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan kategori penggolongan berdasarkan mata pencaharian karena mata pencaharian merupakan salah satu faktor penting dalam melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat. Desa Cihamerang merupakan salah satu desa yang tergolong memiliki keragaman mata pencaharian masyarakat, meskipun pada kenyataannya mayoritas masyarakat di Desa Cihamerang masih bertumpu pada sektor pertanian.

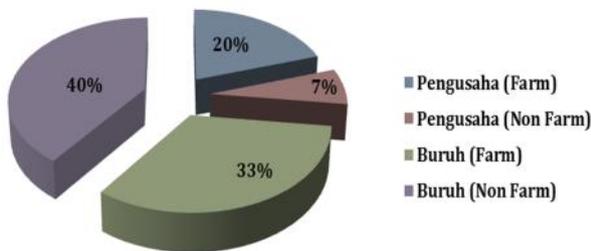
Pembagian kategori sosial terbagi ke dalam empat kelompok, yakni: (a) kategori sosial 1 adalah masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian (*farm*) dengan kepemilikan usaha pribadi (sebagai pengusaha); (b) kategori sosial 2 adalah masyarakat yang bekerja pada sektor non-pertanian (*non-farm*) dengan kepemilikan usaha pribadi (sebagai pengusaha); (c) kategori sosial 3 adalah masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian (*farm*) dengan kepemilikan usaha oleh orang lain (sebagai buruh); (d) kategori sosial 4 merupakan masyarakat yang bekerja pada sektor non-pertanian (*non-farm*) dengan kepemilikan usaha oleh orang lain (sebagai buruh). Keempat kategori sosial atau penggolongan tersebut digunakan untuk mengkategorikan seluruh responden dalam penelitian ini, baik responden dari masyarakat pemanfaat program maupun responden dari masyarakat non-pemanfaat program. Berikut adalah diagram jumlah presentase responden

masyarakat pemanfaat program sesuai kategori sosial pada Gambar 1.



Gambar 1. Presentase responden masyarakat pemanfaat program kategori sosial.

Adapun untuk jumlah presentase responden masyarakat non-pemanfaat program menurut kategori sosial ditunjukkan melalui Gambar 2 berikut.



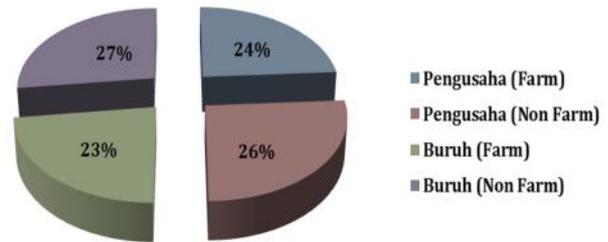
Gambar 2. Presentase responden masyarakat non-pemanfaat program kategori sosial.

Berdasarkan Gambar 1 dan 2 bahwa jumlah tertinggi masyarakat pemanfaat program adalah masyarakat dengan golongan kategori sosial *non-farm*/buruh yakni sebesar 34%, sedangkan jumlah terendah masyarakat pemanfaat program adalah masyarakat dengan kategori *non-farm*/pengusaha yakni sejumlah 13%. Untuk kategori sosial *farm*/pengusaha dan *farm*/buruh berada pada rata-rata tengah yakni sejumlah 30% dan 23%. Sebagai pembandingan adalah kategori sosial dari masyarakat non-pemanfaat dengan jumlah tertinggi dan terendah dari karakteristik masyarakat ini adalah dari kategori sosial *non-farm*/buruh dan kategori *non-farm*/pengusaha, sedangkan untuk kategori sosial *farm*/buruh dan *farm*/pengusaha masih tetap berada pada rata-rata tengah.

### Tingkat Partisipasi Masyarakat

Adapun tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program pemberdayaan ekonomi lokal melalui pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kartini di Kecamatan Kalandungan, khususnya Desa Cihamerang, didasarkan pada tangga partisipasi, seperti tingkat manipulasi, tingkat terapi, tingkat

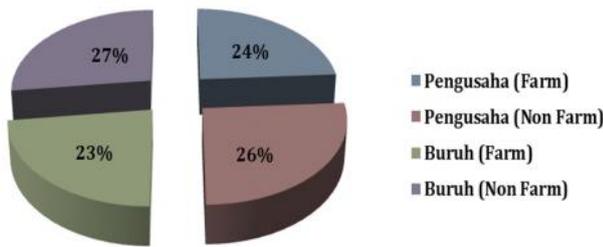
pemberitahuan, tingkat konsultasi, tingkat penenteraman, tingkat kemitraan, tingkat pendelegasian kekuasaan, dan tingkat kontrol masyarakat. Pada praktik penyelenggaraan program terdapat berbagai jenjang partisipasi dari masyarakat pemanfaat program, dimana seluruh jenjang ini ditentukan oleh seberapa jauh masyarakat berpartisipasi atau terlibat pada seluruh tahapan proses penyelenggaraan. Pengukuran tingkat partisipasi dilakukan berdasarkan keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan program yang dilaksanakan, baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, maupun tahap pelaporan. Keempat kategori responden dalam penelitian, baik masyarakat pemanfaat program maupun masyarakat non-pemanfaat program memiliki tingkatan partisipasi yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat dari Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Presentase tingkat partisipasi masyarakat dalam program menurut kategori sosial.

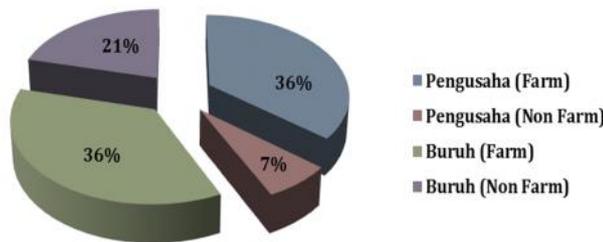
Berdasarkan Gambar 3, kategori sosial *non-farm*/buruh memiliki keterlibatan paling tinggi dalam penyelenggaraan program pemberdayaan ekonomi lokal melalui kegiatan simpan pinjam koperasi, sedangkan kategori sosial *farm*/buruh memiliki keterlibatan yang paling rendah dalam partisipasi terhadap program. Kategori sosial pengusaha (*farm* dan *non-farm*) cenderung memiliki tingkat partisipasi yang sedang.

Secara umum, tingkat partisipasi masyarakat tergolong sedang, yaitu berada pada tingkat pemberitahuan (*informing*), tingkat konsultasi (*consultation*), hingga tingkat penenteraman (*placation*). Dalam hal ini, masyarakat pemanfaat program hanya diarahkan untuk menerima informasi melalui sosialisasi dan jika ada saran, masyarakat hanya sekedar didengar atau diterima, namun tidak untuk dilaksanakan. Berikut adalah diagram (Gambar 4) yang menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kelompok simpan pinjam LKMS Kartini berdasarkan tingkatan dalam tangga partisipasi Arstein.



Gambar 4. Partisipasi masyarakat pemanfaat program menurut tangga partisipasi Arstein

Tipe pemberitahuan (*informing*) merupakan tipe ketiga. Tipe ini diberikan pemberitahuan searah kepada masyarakat tanpa ada umpan balik dari masyarakat, sehingga apapun yang diinformasikan oleh pemangku kepentingan terkait, masyarakat tidak memiliki kekuasaan untuk berkontribusi dalam mengambil keputusan. Secara lebih spesifik tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kelompok simpan pinjam LKMS Kartini terdapat pada tipe pemberitahuan, seperti yang dapat dilihat berdasarkan kategori sosial melalui Gambar 5.

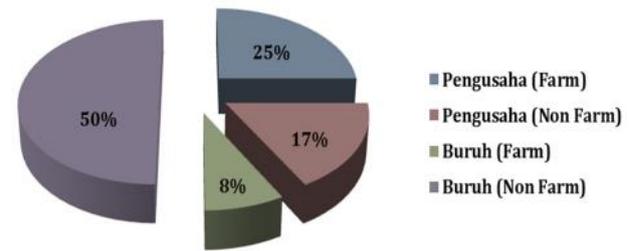


Gambar 5. Partisipasi masyarakat untuk tipe pemberitahuan menurut kategori sosial

Partisipasi pada tingkatan ini bertipe pemberitahuan. Kategori sosial masyarakat *farm*/buruh dan *farm*/pengusaha memiliki jumlah terbesar, yakni sebanyak 36% dari total, sedangkan kategori *non-farm*/pengusaha memiliki jumlah yang paling rendah, yaitu sejumlah 7% dan sisanya 21% merupakan milik kategori sosial *non-farm*/buruh. Kategori sosial yang tertinggi pada tipe ini sama-sama berasal dari kategori *farm*.

Selanjutnya, tipe konsultasi (*consultation*) yang merupakan tipe keempat dari tangga partisipasi. Pada tahapan ini, pihak pemangku kepentingan terkait cenderung mendengarkan aspirasi atau saran dari masyarakat, namun belum tentu saran tersebut dipakai. Berikut adalah Gambar 6 yang menggambarkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kelompok simpan

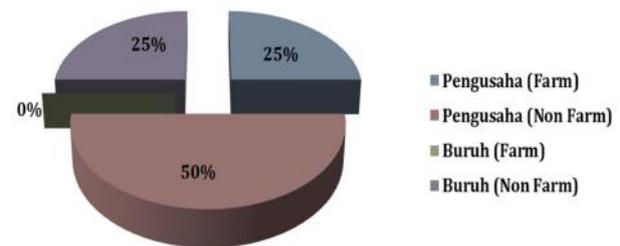
pinjam LKMS Kartini untuk tipe konsultasi sesuai kategori sosial.



Gambar 6. Partisipasi masyarakat untuk tipe konsultasi menurut kategori sosial

Data pada Gambar 6 menunjukkan bahwa kategori sosial *non-farm*/buruh memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam tipe konsultasi, yaitu sebesar 50%, sedangkan kategori *farm*/buruh memiliki tingkat partisipasi terendah pada tipe konsultasi, yaitu sebesar 8%, kategori *farm*/pengusaha dan *non-farm*/pengusaha memiliki nilai yang sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat pemanfaat pada kategori masyarakat yang bekerja pada sektor non-pertanian dalam melakukan kontrol terhadap keterlibatan pada penyelenggaraan tergolong tinggi.

Tipe penenteraman (*placation*) merupakan tipe kelima. Pada tipe ini, saran dari masyarakat cenderung diterima tapi tidak selalu dilaksanakan. Gambar 7 berikut ini merupakan tingkatan partisipasi pada tipe penenteraman menurut kategori sosial.



Gambar 7. Partisipasi masyarakat pemanfaat untuk tipe penenteraman menurut kategori sosial

Tipe penenteraman merupakan tingkatan tertinggi dalam konteks partisipasi masyarakat pemanfaat program LKMS Kartini. Dapat dilihat bahwa masyarakat pemanfaat dengan jumlah tipe partisipasi penenteraman tertinggi adalah masyarakat dari kategori sosial *non-farm*/pengusaha, yakni sebanyak 50%. Kategori sosial ini dinilai tidak dapat mencapai tingkatan partisipasi tipe penenteraman. Untuk kategori

*farm*/pengusaha dan *non-farm*/buruh memiliki nilai sedang, yakni 25%.

Banyak faktor yang berpengaruh terhadap sejauhmana tingkat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program. Dalam hal ini, dapat terlihat bahwa keterlibatan masyarakat Cihamerang pemanfaat program tergolong rendah menuju sedang dengan tingkat kekuasaan pada level tokenism, yakni berorientasi pada justifikasi masyarakat agar mengiyakan segala sesuatu yang telah dirancang.

Meskipun demikian, jika dilihat dari keseluruhan proses penyelenggaraan program, terdapat beberapa tokoh masyarakat yang memegang kendali pada keberlangsungan kegiatan ini. Tokoh masyarakat tersebut adalah pihak yang pada saat ini berperan sebagai pengurus koperasi. Mereka merupakan pihak-pihak yang terlibat dari awal pelaksanaan program hingga evaluasi dan pelaporan, sedangkan masyarakat peserta kelompok simpan pinjam, termasuk masyarakat pemanfaat program di Desa Cihamerang, cenderung berpartisipasi pada tahap pelaksanaan dan terbatas pada kegiatan simpan pinjam saja.

### Tingkat Partisipasi Stakeholder

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Kartini merupakan LKM yang mendapatkan dari Perusahaan Geothermal untuk melakukan pengembangan ekonomi masyarakat di tingkat lokal, yakni melalui program Community Based Micro Finance (CBMF). Penyelenggaraan LKMS Kartini ini merupakan wujud dari pelaksanaan program Community Development perusahaan Geothermal sebagai bagian dari *corporate social responsibility implementation*.

Program Community Development (pengembangan masyarakat) sebagai salah satu

dari tujuh isu CSR merupakan sarana aktualisasi CSR yang paling baik jika dibandingkan dengan implementasi yang hanya berupa *charity, philanthropy*, atau dimensi-dimensi CSR yang lain. Hal itu karena dalam pelaksanaan comdev terdapat prinsip-prinsip kolaborasi kepentingan bersama antara perusahaan dengan komunitas dengan adanya partisipasi, produktivitas, keberlanjutan, dan mampu meningkatkan perasaan solidaritas.

Penyelenggaraan LKMS Kartini tersebut melibatkan berbagai pihak (stakeholder), yakni pemerintah desa dan kecamatan, Dinas Koperasi, mitra perusahaan, serta masyarakat. Stakeholders diterjemahkan sebagai pemangku kepentingan adalah pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan kelompok-kelompok tersebut mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh perusahaan (Saidi 2003). Dalam hal ini, stakeholder-stakeholder tersebut terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan program pemberdayaan ekonomi lokal meskipun dengan tingkatan keterlibatan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya.

Menurut Sukada (2007), pelibatan pemangku kepentingan ditentukan berdasarkan derajat relevansinya dengan keberadaan serta program yang akan diselenggarakan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penentu sukses atau tidaknya penyelenggaraan program LKMS Kartini.

Terkait dengan bagaimana dan sejauhmana keterlibatan stakeholder-stakeholder dalam penyelenggaraan LKMS Kartini dapat dilihat melalui Tabel 1.

Tabel 1. Keterlibatan stakeholder-stakeholder dalam penyelenggaraan program

Tahapan penyelenggaraan	Stakeholder yang terlibat dalam masing-masing tahapan penyelenggaraannya beserta bentuk keterlibatannya
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat: ide untuk menyelenggarakan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (<i>sustainable</i>).</li> <li>• Perusahaan dan mitra: menyusun perencanaan keseluruhan, baik yang bersifat teknis maupun administratif.</li> <li>• Pemerintah desa/kecamatan: pemberian informasi dan perekrutan pengurus koperasi.</li> <li>• Dinas Koperasi: mengeluarkan izin pendirian koperasi untuk LKMS Kartini.</li> </ul>
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat: baik sebagai anggota maupun pengurus, pengurus dalam hal ini terlibat dalam kegiatan langsung koperasi serta mengikuti pelatihan-</li> </ul>

	<p>pelatihan untuk menguatkan kapasitas, sedangkan anggota mengikuti program simpan pinjam setiap minggu dalam pertemuan mingguan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitra perusahaan: melakukan pendampingan terhadap seluruh aktivitas koperasi, meliputi <i>accounting</i>, <i>Standart Operation Procedure</i> (SOP), <i>Madani Micro Banking System</i> (MMS), dan lain-lain.</li> <li>• Perusahaan: hanya sekedar mengontrol kegiatan koperasi, tanpa terlibat langsung di dalamnya.</li> <li>• Pemerintah desa/kecamatan: memiliki fungsi perizinan, namun dalam pelaksanaannya tidak terlibat langsung.</li> </ul>
Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat: anggota tidak terlibat langsung, serta hanya pengurus koperasi yang terlibat dalam tahap evaluasi kegiatan koperasi.</li> <li>• Mitra perusahaan: bersama-sama pengurus koperasi mengevaluasi sejauhmana pencapaian koperasi dalam hal kenaikan pembiayaan, penambahan anggota, pembiayaan macet, peningkatan pendapatan, dan kinerja pelaksana.</li> <li>• Pemerintah desa/kecamatan: hanya sebatas mengetahui, namun tidak dilibatkan dalam evaluasi (dianggap terlalu rumit, hanya berorientasi pada uang).</li> <li>• Perusahaan: menerima hasil evaluasi dari mitra, kemudian bersama-sama dengan mitra membahas permasalahan tersebut sekaligus mencari solusi yang tepat.</li> </ul>
Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat: dalam hal ini hanya pengurus koperasi saja yang terlibat untuk membuat pelaporan.</li> <li>• Mitra perusahaan: menerima pelaporan dari pengurus koperasi.</li> <li>• Perusahaan: menerima pelaporan dari mitra perusahaan.</li> <li>• Pemerintah desa/kecamatan: tidak dilibatkan sama sekali dalam tahap pelaporan.</li> </ul>

Tabel 1. memperlihatkan keterlibatan atau partisipasi stakeholder-stakeholder pada setiap tahap penyelenggaraan program. Dalam hal ini, dapat dianalisis bahwa tidak semua stakeholder berpartisipasi pada setiap tahapan penyelenggaraan program. Masing-masing stakeholder memiliki kecenderungan keterlibatannya sesuai dengan kepentingan mereka. Derajat keterlibatan dapat dinilai dari beberapa aspek, yakni intensitas partisipasi stakeholder pada setiap tahapan penyelenggaraan, pengaruh peran dan fungsi stakeholder, serta kemampuan dan akses dalam pengambilan keputusan.

Perusahaan Geothermal dan Mitra Perusahaan (PNM) terlibat pada setiap tahapan penyelenggaraan program. Dalam hal ini, perusahaan Geothermal adalah pihak yang pertama kali memfasilitasi ide dari masyarakat untuk membentuk sebuah lembaga keuangan mikro sebagai pendukung dari keberadaan usaha-usaha kecil menengah di tingkat masyarakat lokal, sedangkan mitra perusahaan berpartisipasi sebagai fasilitator yang mendampingi koperasi pada setiap tahapan penyelenggaraan program. Bentuk partisipasi

kedua pihak tersebut memang cenderung berbeda.

Perusahaan Geothermal lebih berperan dalam bidang manajerial program, sedangkan mitra perusahaan lebih ke hal-hal teknis pada seluruh tahapan penyelenggaraan. Tipe kemitraan dalam tingkatan partisipasi kedua pemangku kepentingan tersebut menggambarkan bagaimana tingkatan kekuasaan yang mereka miliki. Kedua belah pihak stakeholder memiliki kerja sama yang saling menguntungkan satu sama lain, tapi keduanya memiliki kontrol melalui keterlibatannya tersebut.

Masyarakat yang berposisi sebagai pengurus koperasi juga memiliki tipe partisipasi kemitraan. Ide pendirian koperasi ini berasal dari kategori masyarakat tersebut, namun dalam perencanaan program, para pengurus koperasi ini tidak dilibatkan dalam perancangan program. Para pengurus tersebut mengikuti tahapan yang telah dipersiapkan oleh para konseptor, baik dari perusahaan Geothermal maupun mitra perusahaan.

Masyarakat dan Dinas Koperasi merupakan dua pihak stakeholder yang memiliki tipe partisipasi dalam hubungan kekuasaan yang bersifat

tokenism. Tipe partisipasi stakeholder-stakeholder tersebut berada pada tingkatan pemberitahuan, konsultasi, hingga penenteraman. Seluruh stakeholder terkait diberikan pendampingan dan konsultasi oleh semua pihak (pemerintah dan perusahaan) sehingga pandangan-pandangan diperhitungkan dan tetap dilibatkan dalam menentukan keputusan.

Dinas Koperasi memiliki wewenang untuk melakukan audit pada kelayakan LKMS Kartini untuk selanjutnya diberi izin pendirian koperasi sehingga harus mengimplementasikan kaidah-kaidah pada Badan Hukum Koperasi. Masyarakat dengan tipe partisipasi ini adalah masyarakat yang tergolong sebagai anggota koperasi maupun anggota kelompok, dimana masyarakat cenderung hanya terlibat pada tahapan pelaksanaan. Sebagian besar masyarakat memiliki intensitas keterlibatan yang tinggi, khususnya pada pertemuan atau kumpulan mingguan kelompok.

Beberapa masyarakat memiliki kemampuan dalam menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah akses mereka cenderung terbatas. Masyarakat berposisi lebih kepada penerima program yang selanjutnya diarahkan untuk bisa mengembangkan usaha pribadi secara mandiri, bukan ditekankan pada partisipasi dalam penyelenggaraan LKMS.

Stakeholder yang terakhir adalah pemerintah Desa Cihamerang dan pemerintah Kecamatan.

Kedua stakeholder tersebut memiliki posisi dan derajat keterlibatan yang sama dengan tipe partisipasi terapi, dimana pada tingkatan tersebut stakeholder tidak terlibat secara langsung dalam program ini.

Dapat dilihat sebelumnya, pihak pemerintah desa dan kecamatan hanya berposisi sebagai pemberi izin bagi penyelenggaraan program ini karena dalam pelaksanaannya staf LKMS Kartini harus secara intens terjun langsung ke lapangan, sehingga memerlukan dukungan dari pihak aparat desa maupun kecamatan dalam hal pendekatan atau sosialisasi kepada masyarakat. Sementara itu, aparat desa dan kecamatan hanya dilibatkan ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu sebagai tamu undangan, serta memberikan saran dari perkembangan LKMS Kartini. Namun, dalam hal ini mereka tidak terlibat dalam penyelenggaraan baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, bahkan pelaporan.

### Dampak Ekonomi Penyelenggaraan Program

Variabel pertama yang dilihat untuk mengukur dampak ekonomi adalah taraf hidup rumah tangga masyarakat. Berikut adalah Tabel 2 yang menunjukkan bagaimana dampak penyelenggaraan program pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat terhadap taraf hidup rumah tangga masyarakat.

Tabel 2. Skor rata-rata taraf hidup masyarakat menurut kategori sosial

No	Kategori Sosial	Skor Rata-rata Taraf Hidup Masyarakat menurut Kategori Sosial		A-B
		Masyarakat Pemanfaat Program (A)	Masyarakat Non-Pemanfaat Program (B)	
1	<i>Farm</i> /Pengusaha	21	22	-1
2	<i>Non-Farm</i> /Pengusaha	20,2	18	2,2
3	<i>Farm</i> /Buruh	15	16,4	-1,4
4	<i>Non-Farm</i> /Buruh	20,9	18	2,9

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa tidak semua kategori sosial memperoleh dampak taraf hidup positif dari adanya penyelenggaraan LKMS Kartini. Kategori sosial *non-farm*/pengusaha dan *non-farm*/buruh memiliki dampak positif dalam taraf hidup terhadap penyelenggaraan LKMS Kartini, sedangkan dampak taraf hidup negatif dapat

dilihat pada kategori sosial *farm*/pengusaha dan *farm*/buruh.

Hal-hal tersebut berarti keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan belum tentu mementukan peningkatan taraf hidup masyarakat. Untuk variabel tingkat pendapatan masyarakat dapat dilihat melalui Tabel 3.

Tabel 3. Skor rata-rata pendapatan (Rp/bulan) menurut kategori sosial

No	Kategori sosial	Skor rata-rata pendapatan (Rp/bulan) menurut kategori sosial		A-B
		Masyarakat pemanfaat program (A)	Masyarakat non-pemanfaat program (A)	
		1	<i>Farm</i> /Pengusaha	
2	<i>Non-Farm</i> /Pengusaha	2990000	3450000	-460000
3	<i>Farm</i> /Buruh	793300	420000	373300
4	<i>Non-Farm</i> /Buruh	1594000	1181700	412300

Tabel 3 menunjukkan bahwa tidak semua kategori sosial memperoleh dampak positif dalam tingkat pendapatan terhadap penyelenggaraan LKMS Kartini. Keterlibatan dalam program ini tidak memberikan dampak bagi pendapatan masyarakat pemanfaat dari kategori sosial *farm*/pengusaha dan *non-farm* pengusaha, sedangkan masyarakat pemanfaat dari kategori sosial *farm*/buruh dan *non-farm*/buruh memperoleh dampak bagi pendapatannya. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai delta yang positif pada pendapatan. Artinya, keterlibatannya dalam penyelenggaraan

program ini dimungkinkan membawa dampak bagi perolehan pendapatan rumah tangga per bulan. Akan tetapi, data juga menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak terlibat dalam program belum tentu pendapatannya lebih rendah dibanding masyarakat yang terlibat dalam program.

Melihat aspek dampak pada tingkat pendapatan, perlu disesuaikan juga dengan bagaimana tingkat pengeluaran rumah tangga masyarakat pemanfaat. Berikut adalah Tabel 4 yang menggambarkan bagaimana dampak terhadap tingkat pengeluaran masyarakat.

Tabel 4. Skor rata-rata tingkat pengeluaran masyarakat menurut kategori sosial

No	Kategori Sosial	Skor Rata-rata Pengeluaran (Rp/Bulan) menurut Kategori Sosial		A-B
		Masyarakat Pemanfaat Program (A)	Masyarakat Non-Pemanfaat Program (B)	
		1	<i>Farm</i> /Pengusaha	
2	<i>Non-Farm</i> /Pengusaha	2990000	3450000	-460000
3	<i>Farm</i> /Buruh	793300	420000	373300
4	<i>Non-Farm</i> /Buruh	1594000	1181700	412300

Data pada Tabel 4 menunjukkan hal yang serupa seperti apa yang dipaparkan pada Tabel 3 tingkat pendapatan, yakni tidak semua kategori sosial masyarakat memiliki delta yang positif. Aspek tingkat pendapatan memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek tingkat pengeluaran. Sebuah rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang tinggi namun pengeluaran juga tinggi, bahkan defisit tidak lebih baik dibandingkan rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang rendah namun pengeluaran juga rendah. Masyarakat dengan kategori sosial *farm*/buruh dan *non-farm*/buruh sama-sama memiliki nilai positif. Artinya, masyarakat pemanfaat program pada kategori sosial tersebut memiliki pengeluaran yang lebih besar dibanding masyarakat yang tidak terlibat dalam

penyelenggaraan program. Masyarakat dengan kategori sosial *farm*/pengusaha dan *non-farm*/pengusaha sama-sama memiliki nilai delta negatif. Artinya, belum tentu masyarakat non-pemanfaat program memiliki jumlah pengeluaran yang lebih rendah dibanding masyarakat pemanfaat program.

Aspek tingkat pendapatan dan tingkat pengeluaran memiliki keterkaitan dengan aspek tabungan (*saving*). Masyarakat dapat mengatur keuangan rumah tangga mereka dan berpikir progresif dengan menyalurkan sebagian pendapatan untuk tujuan masa depan. Berikut Tabel 5 yang menunjukkan bagaimana dampak keterlibatan masyarakat terhadap tingkat tabungan rumah tangga masyarakat menurut kategori sosial.

Tabel 5. Skor rata-rata tingkat tabungan masyarakat menurut kategori sosial

No	Kategori Sosial	Skor Rata-rata Tabungan (Rp/Bulan) menurut Kategori Sosial		A-B
		Masyarakat Pemanfaat Program (A)	Masyarakat Non-Pemanfaat Program (B)	
1	<i>Farm</i> /Pengusaha	606700	10000	596700
2	<i>Non-Farm</i> /Pengusaha	146000	0	146000
3	<i>Farm</i> /Buruh	6700	5000	1700
4	<i>Non-Farm</i> /Buruh	46500	73300	-26800

Tabel 5 memperlihatkan bahwa masyarakat pemanfaat program dengan kategori sosial *farm*/pengusaha, *non-farm*/pengusaha, dan *farm*/buruh memiliki nilai delta yang positif pada variabel tingkat tabungan. Artinya, masyarakat pemanfaat program tersebut memiliki kemampuan untuk menabung dibandingkan masyarakat non-pemanfaat program pada kategori sosial tersebut. Sementara itu, untuk data kategori sosial *non-farm*/buruh menunjukkan nilai delta yang negatif, artinya masyarakat pemanfaat kategori tersebut memiliki rata-rata tingkat tabungan yang lebih rendah dibanding masyarakat non-pemanfaat program pada kategori tersebut. Secara umum, keterlibatan masyarakat pada penyelenggaraan program pemberdayaan ekonomi lokal melalui kegiatan simpan pinjam LKMS Kartini memberi dampak pada tingkat ekonomi masyarakat tapi tidak pada seluruh aspek dan tidak pada seluruh kategori sosial. Artinya, terdapat faktor-faktor lain di luar keikutsertaan masyarakat tersebut yang berpengaruh terhadap taraf hidup masyarakat.

### Dampak Sosial Penyelenggaraan Program

Dampak sosial didefinisikan sebagai perubahan yang dirasakan oleh masyarakat pemanfaat setelah terlibat dalam penyelenggaraan program pada variabel kepercayaan (*trust*), variabel kerjasama (*cooperation*), dan variabel jejaring

(*networking*). Dampak sosial dalam hal ini dapat dilihat dengan menghitung senjang/delta dari skor total variabel-variabel dalam modal sosial. Tingkat kepercayaan didefinisikan sebagai perasaan tanpa saling curiga dan cenderung saling ingin memajukan antar anggota masyarakat. Pengukuran tingkat kepercayaan didasarkan pada kepercayaan antara masyarakat, baik pemanfaat program maupun non-pemanfaat program.

Variabel kedua pada dampak pengukuran adalah kekuatan kerja sama yang didefinisikan sebagai sebuah kondisi dimana di dalam masyarakat terdapat norma-norma untuk bekerja sama, bukan bekerja sendiri. Sikap-sikap kooperatif, keinginan untuk membaktikan diri, akomodatif, menerima tugas dan penugasan untuk kemaslahatan bersama, serta keyakinan bahwa kerja sama akan menguntungkan, yakni antar masyarakat baik masyarakat pemanfaat maupun masyarakat non-pemanfaat. Variabel ketiga adalah kekuatan jaringan yang didefinisikan sebagai interaksi dan relasi individu masyarakat dengan individu lain dalam masyarakat maupun pihak eksternal. Pengukurannya didasarkan pada kekuatan solidaritas dan kerja sama yang terbentuk sebagai hasil dari interaksi sosial tersebut. Berikut adalah Tabel 6 perbandingan variabel modal sosial antara masyarakat pemanfaat program dan masyarakat non-pemanfaat program berdasarkan kategori sosial.

Tabel 6. Skor rata-rata kekuatan modal sosial masyarakat menurut kategori sosial

No	Kategori Sosial	Skor Rata-rata Modal Sosial menurut Kategori Sosial		A-B
		Masyarakat Pemanfaat Program (A)	Masyarakat Non-Pemanfaat Program (B)	
1	<i>Farm</i> /Pengusaha	48,51	48,33	0,18
2	<i>Non-Farm</i> /Pengusaha	49,6	57	-6,4
3	<i>Farm</i> /Buruh	47,44	44,73	2,71
4	<i>Non-Farm</i> /Buruh	50,63	41,94	8,69

Penyelenggaraan kegiatan kelompok simpan pinjam oleh LKMS Kartini memberi dampak pada modal sosial masyarakat ketika selisih nilai antara masyarakat pemanfaat program dan masyarakat non-pemanfaat program bernilai positif. Namun, pada kenyataannya tidak semua kategori sosial masyarakat memiliki nilai positif untuk selisih nilai modal sosial. Data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa masyarakat kategori *non-farm*/pengusaha memiliki nilai selisih negatif, artinya keterlibatannya dalam penyelenggaraan program pemberdayaan ekonomi lokal melalui kelompok simpan pinjam tidak memberi dampak positif. Namun, untuk tiga kategori sosial lain, yakni *farm*/pengusaha, *farm*/buruh, dan *non-farm*/buruh memiliki nilai selisih positif. Artinya, keterlibatan masyarakat pada kategori tersebut dalam penyelenggaraan program dimungkinkan memberikan dampak positif.

Secara umum, jika dikaitkan dengan konteks lokal wilayah penelitian dan karakteristik masyarakat di Desa Cihamerang, serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan program simpan pinjam LKMS Kartini bukan menjadi satu-satunya faktor yang menentukan kekuatan modal sosial pada masyarakat pemanfaat program. Kondisi struktural dan kultural masyarakat juga mempengaruhi bagaimana kekuatan modal sosial dalam interaksi antar komponen masyarakat.

### **Sintesa Partisipasi Masyarakat terhadap Dampak Sosial Ekonomi**

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Kartini merupakan LKM yang mendapatkan dari perusahaan Geothermal untuk melakukan pengembangan ekonomi masyarakat di tingkat lokal, yakni melalui program Community Based Micro Finance (CBMF). Penyelenggaraan LKMS Kartini ini merupakan wujud dari pelaksanaan program Community Development perusahaan Geothermal sebagai bagian dari *corporate social responsibility implementation*. Program pemberdayaan melalui pembentukan koperasi ini membangun akses masyarakat terhadap pinjaman modal untuk mendirikan usaha skala kecil maupun mengembangkan usaha yang sudah ada.

Community Development (Pengembangan Masyarakat) sebagai salah satu dari tujuh isu CSR merupakan sarana aktualisasi CSR yang paling baik jika dibandingkan dengan implementasi yang hanya berupa *charity*, *philanthropy*, atau dimensi-dimensi CSR yang

lain, karena dalam pelaksanaan Community Development terdapat prinsip-prinsip kolaborasi kepentingan bersama antara perusahaan dengan komunitas, adanya partisipasi, produktivitas, keberlanjutan, dan mampu meningkatkan perasaan solidaritas. Keberhasilan suatu program pemberdayaan salah satunya ditentukan oleh sejauh mana stakeholder atau kerap disebut sebagai pemangku kepentingan berpartisipasi dalam penyelenggaraan program pemberdayaan. Stakeholder dalam penyelenggaraan program ini adalah masyarakat, pemerintah (mencakup pemerintah desa, kecamatan, dan Dinas Koperasi), dan swasta (mencakup perusahaan Geothermal dan mitra perusahaan).

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis menggunakan tingkatan partisipasi menurut Arstein atau *ladder of citizen participation*, dapat diketahui secara umum tingkat partisipasi masyarakat berada pada tingkat pemberitahuan (*informing*), tingkat konsultasi (*consultation*), hingga tingkat penenteraman (*placation*). Dalam hal ini, masyarakat pemanfaat program hanya diarahkan untuk menerima informasi melalui sosialisasi dan jika ada saran dari masyarakat hanya sekedar didengar atau diterima, namun tidak untuk dilaksanakan. Perusahaan Geothermal beserta mitranya dan masyarakat pengurus koperasi memiliki tipe partisipasi yang tergolong dalam tipe kemitraan dimana kedua belah pihak stakeholder memiliki kerja sama yang saling menguntungkan satu sama lain, tapi keduanya memiliki kontrol melalui keterlibatannya tersebut. Masyarakat dalam hal ini yang berposisi sebagai pengurus koperasi juga memiliki tipe partisipasi kemitraan.

Dinas Koperasi dalam hal ini memiliki wewenang untuk melakukan audit kelayakan pada LKMS Kartini untuk selanjutnya diberi izin pendirian koperasi sehingga harus mengimplementasikan kaidah-kaidah pada Badan Hukum Koperasi. Tingkatan partisipasi Dinas Koperasi ini tergolong dalam tipe pemberitahuan (*informing*). Stakeholder yang terakhir adalah pemerintah Desa Cihamerang dan pemerintah kecamatan. Kedua stakeholder tersebut memiliki posisi dan derajat keterlibatan yang sama dengan tipe partisipasi terapi. Pada tingkatan tersebut, stakeholder tidak terlibat secara langsung dalam program ini.

Dampak sosial didefinisikan sebagai perubahan yang dirasakan oleh masyarakat pemanfaat setelah terlibat dalam penyelenggaraan program. Dampak sosial dalam hal ini dapat

dilihat dengan menghitung senjang atau delta dari skor total variabel-variabel dalam modal sosial. Tingkat kepercayaan didefinisikan sebagai perasaan tanpa saling curiga dan cenderung saling ingin memajukan diantara anggota masyarakat. Secara umum, keterlibatan masyarakat pada penyelenggaraan program pemberdayaan ekonomi lokal melalui kegiatan simpan pinjam LKMS Kartini memberi dampak pada tingkat ekonomi masyarakat tapi tidak pada seluruh aspek dan tidak pada seluruh kategori sosial. Hal ini berarti terdapat faktor-faktor lain di luar keikutsertaan masyarakat tersebut yang berpengaruh terhadap kekuatan modal sosial masyarakat.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

### Kesimpulan

Penyelenggaraan LKMS Kartini berawal dari inisiatif masyarakat untuk membentuk lembaga keuangan yang dapat mendukung usaha-usaha kecil menengah masyarakat hingga dilakukan perencanaan secara menyeluruh oleh perusahaan Geothermal bersama dengan mitra perusahaan. Selanjutnya, masyarakat yang menjadi pionir dalam program ini mulai melibatkan diri pada tahap pelaksanaan hingga evaluasi dengan menjadi pengurus LKMS Kartini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program pemberdayaan ekonomi lokal dan stakeholder berhubungan dengan dampak sosial dan ekonomi masyarakat sehingga jika partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program tinggi, maka dampak sosial dan ekonomi juga akan tinggi.

Dampak sosial ekonomi diperoleh masyarakat ditentukan oleh partisipasi dari stakeholder lain yang terkait. Jika dilihat dari klasifikasi kategori sosial yang ada, masyarakat dengan kategori sosial *farm*/buruh memiliki tingkat partisipasi yang paling rendah diantara kategori sosial yang lain. Keikutsertaan masyarakat kategori sosial tersebut sejalan dengan kondisi taraf hidup masyarakat karena tidak ada nilai peningkatan taraf hidup setelah mengikuti kegiatan simpan pinjam. Meskipun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dengan kategori sosial tersebut memiliki hubungan terhadap tingkat pendapatan, tingkat tabungan, dan kekuatan modal sosial. Untuk kategori masyarakat *non-farm*/pengusaha, dan *farm*/pengusaha tingkat partisipasi mereka tergolong sedang, namun

data menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat pada kategori sosial tersebut tidak diikuti oleh peningkatan tingkat pendapatan, tingkat tabungan, serta kekuatan modal sosial kecuali untuk variabel taraf hidup, karena data menunjukkan bahwa terdapat peningkatan taraf hidup pada masyarakat kategori *non-farm*/pengusaha.

Banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat selain keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan program. Artinya, keterlibatan mereka dalam program ini bukan menjadi satu-satunya penentu taraf hidup, tingkat pendapatan, tingkat tabungan, serta bagaimana kekuatan modal sosial masyarakat. Karakteristik rumah tangga seperti tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga usia produktif, pengeluaran rumah tangga, jenis pekerjaan/usaha rumah tangga, jumlah tanggungan keluarga berpengaruh juga terhadap kondisi ekonomi rumah tangga. Sementara itu, untuk kondisi sosial terdapat beberapa faktor yang berpengaruh selain keterlibatan masyarakat dalam program ini, yaitu nilai-nilai lokal yang mereka percaya sebagai pedoman dalam berinteraksi dengan sesama dan stigma yang membudaya diantara stakeholder.

### Implikasi

Mengacu pada hasil penelitian, maka terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan implikasi antara lain sebagai berikut:

- (1) sebaiknya perusahaan Geothermal melakukan pendekatan intensif terhadap masyarakat dan pemerintah, begitu pun pemerintah dan masyarakat terhadap perusahaan Geothermal sehingga tercipta hubungan yang lebih harmonis, saling mempercayai satu sama lain, dan dapat membangun kerjasama yang baik;
- (2) pentingnya dilakukan sosialisasi sebelum diselenggarakan secara menyeluruh dan terintegratif sehingga pengetahuan dan pemanfaatan masyarakat dalam program dapat maksimal;
- (3) seluruh stakeholder dapat dilibatkan pada setiap tahapan penyelenggaraan program CSR yang mengangkat isu pemberdayaan agar terbentuk sinergi antar stakeholder sehingga program tersebut dapat secara berkelanjutan melibatkan seluruh stakeholder secara partisipatif;

- (4) pentingnya pendampingan *outreach* staf kepada masyarakat dalam hal pengelolaan usaha, sehingga apabila masyarakat menemui permasalahan dalam usahanya, *outreach* staf dapat membantu mengkonsultasikan permasalahan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budimanta A dan Rudito B. 2003. Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development. ICSD, Jakarta.
- Nasdian FT. 2006. Pengembangan Masyarakat (Community Development). Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Saidi Z. 2003. Sumbangan Sosial Perusahaan: Profil dan Pola Distribusinya di Indonesia Survei 226 Perusahaan di 10 Kota. Piramedia, Jakarta Selatan.
- Singarimbun M. 2006. Metode Penelitian Survei. PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Sitorus F. 1998. Penelitian Kualitatif "Suatu Perkenalan". Kelompok dokumentasi ilmu-ilmu sosial untuk Laboratorium Sosiologi, Antropologi, dan Kependudukan, Jurusan Ilmu sosial dan Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian IPB, Bogor.
- Suharto E. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat "Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial". PT Refika Aditama, Bandung.
- Sukada S. 2007. Membumikan Bisnis Berkelanjutan. Indonesia Business Links, Jakarta.
- Wibisono Y. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility). Fascho Publishing, Gresik.